

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi, Rianto, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Algra, dkk., 1983, *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arikunto, Suharsini, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arto, A.M., 2018, *Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah, dan Jinayah*, Kencana, Depok.
- Assiddiqie, Jimly, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Basuki, Sulisty, 2006, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Jakarta.
- Busman, Star dalam Soepomo, 1985, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2011, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Achamd, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Goesniadhie, Kusnu, 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan: Lex Specialis Suatu Masalah*, JP Books, Surabaya.
- Hanijjo, Ronny Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.
- Kelsen, Hans, 1945, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York.
- Harahap, Yahya, 1990, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)*, Balai Pustaka, Bandung.

- , 2006, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta.
- , 2012, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2010, *Pembatasan Perkara*, Leid dan NLRP, Jakarta.
- Panggabean, Henry P, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Mariyadi dan Afandi, 2008, *Hukum Acara Perdata (Panduan Pengembangan Profesi Hukum)*, Visipress Media, Surabaya.
- Marzuki, P.M., 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- , 2010, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenanda Media, Jakarta.
- , 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Moerad, Pontang, 2005, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Moh.Mahfud, MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3S, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1986, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung.
- , 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Narbuko, Cholid dan H Abu Ahmad, 2002, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Angkasa, Jakarta.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Urip Winata, 1983, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sibuea, Hotman P., 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*, Erlangga, Jakarta.
- Sidharta, Arief, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesian*, Utomo, Jakarta.
- Sinaga, V. Harlen, 2015, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Erlangga, Jakarta.
- Soedirjo, 1986, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana: Arti dan Makna*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soepomo, 1985, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung.
- Sumardjono, M.S.W., 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sunarto, 1990, *Metode Penelitian Deskriptif*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Sutiyoso, Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta.
- , 2009, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta.
- Suwasta, A.D., 2011, *Tafsir Hukum Positif Indonesia*, Ali Publishing, Bandung.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tanya, Bernard L., 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Tohari, A. Ahsin, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta.

Yamin, Muhammad, 1952, *Proklamasi dan Konstitusi*, Djambatan, Jakarta.

Wijayanta, Tata dan Firmansyah, Herry, 2013, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, Medpress Digital, Yogyakarta.

## **B. Skripsi/Penelitian/Jurnal**

Ahmad Ali MD, 2012 “Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin”, *Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan*, Edisi 1, 2012, Vol 29, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, hlm. 120 s.d. hlm. 132.

Alkostar, Artidjo, 2009, “Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan”, *Jurnal Varia Peradilan*, No. 281, Vol. XXIV, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 35 s.d. hlm. 42.

Fanani, Ahmad Zaenal, 2011, “Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim”, *Varia Peradilan*, No. 304, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 4 s.d. hlm. 16.

Fence M. Wantu, 2012 “Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vo. 12 No. 3, 2012, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 484 – hlm 492.

Mahkamah Agung RI, 2010, “*Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*”, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 1 sd. 113.

Mahkamah Konstitusi, 2014, “Meniti Keadilan dalam Pengajuan PK Lebih dari Satu Kali”, *Jurnal Konstitusi* No. 86, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 2 sd. 10.

Mandala, Natha Praditya, 2018, *Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata yang Berkeadilan (Studi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 287 PK/PDT/2916)*, *Skripsi*, Program Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Meutia, Pityani, 2019, “Pembatasan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 2, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, hlm. 221 sd. 229.

Nur Sholikin, 2017, “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 20, No. 2, BPHN, Yogyakarta, hlm. 111 sd. 119.

Swantoro, Herri, Efa Laela Fakhriah, dan Isis Ikhwanasyah, 2017, “Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29 Nomor 2, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, hlm. 187 sd. 198.

Utama, Nanda, 1994, Permohonan Peninjauan Kembali dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan, *Tesis*, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wicaksana, Yuristyan Pambudi, 2018, “Implementasi Asas *Ius Curia Novit* Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka”, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 3, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 85 sd. 96.

Wijayanta, Tata, 2014, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 14. No. 2, Mei 2014, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 219.

### C. Internet/Website

Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum dan Keadilan Sosial” dalam <http://www.suduthukum.com>, diakses 20 Mei 2022 pukul 13.50 WIB

Caslav Pejovic, “Civil Law and Common Law: Two Different Paths Leading to The Same Goal”, dalam <http://www.victoria.ac.nz/law/research/publications/about-nzawl/publications/nzawl-yearbooks/yearbook-6,-2000/Pejovic.pdf>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.

Imam Nasima, “Meninjau Kembali Aturan Peninjauan Kembali Perkara Perdata (Bagian 2)”, dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 09 Juni 2022.

Miftakhul Huda, “*Ius Curia Novit*”, dalam <http://www.miftakhulhuda.com/2011/02/ius-curianovit.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.

Yoga Sukmana, “Perkara Menumpuk, MA Minta Tambahan 8 Hakim Agung Lagi”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/15/15291831/perkara-menumpuk-ma-minta-tambahan8-hakim-agung-lagi>, diakses tanggal 30 Juli 2022, diakses 31 Juli 2022 pukul 14.00 WIB

Yustinus Paat, “Jimly Asshiddiqie: Tanpa Novum, PK Tidak Bisa Diulang”,  
<http://www.beritasatu.com/hukum/239520-jimly-asshiddiqie-tanpa-novum-pk-tidakbisadiulang.html>, diakses 31 Juli 2022 pukul 13.00 WIB

#### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85  
PK/PDT/2011

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  
287 PK/PDT/2016

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:  
118PK/Pdt/2018

#### **E. Surat Edaran**

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan  
Permohonan Peninjauan Kembali.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan  
Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan  
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016  
Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

#### **F. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  
Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor  
3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang  
Mahkamah Agung RI. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985  
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3316).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan  
Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5076).